



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU**  
**SEMESTER II**  
**2023**



Orchard Park Boulevard Jalan Raja Haji Ali Kelana Blok K 5-7,  
Belian, Kota Batam, Kepulauan Riau



<http://badiklat-kepri.kemenkumham.go.id>



+62 778 4161030 / +62 87710323030



[badiklat.kepri@kemenkumham.go.id](mailto:badiklat.kepri@kemenkumham.go.id)  
[badiklatkumham.kepri@gmail.com](mailto:badiklatkumham.kepri@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta tindak lanjut atas restrukturisasi program dan kegiatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, sesuai dengan visi dan misi yang dibebankan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam kurun waktu Semester II Tahun Anggaran 2023, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) .

LKJIP ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, serta sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. LKJIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014. LKJIP Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari Pencapaian sasaran dan kegiatan.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan segenap *stakeholders* yang berkepentingan dapat memperoleh data dan informasi yang bermanfaat yang dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Batam, 04 Januari 2024

Kepala,



**Rinto Gunawan Sitorus**  
NIP. 198208292008011001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>VIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
D. ASPEK STRATEGIS .....	8
E. ISU STRATEGIS .....	9
F. SISTEMATIKA LAPORAN .....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA).....	12
B. PERJANJIAN KINERJA .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>20</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	21
A.1 Capaian Perjanjian Kinerja .....	21
A.2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja.....	35
A.3 Penyebab Kerberhasilan dan Kegagalan .....	36
A.4 Kendala dan Strategi Pengendalian .....	37
B. REALISASI ANGGARAN.....	38
B.1 Penyerapan Anggaran.....	38
B.2 Perbandingan Realisasi Anggaran .....	39

B.3	Revisi Anggaran .....	40
C.	CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	42
D.	CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....	43
D.1	E-Performance .....	43
D.2	E-Monev .....	44
E.	PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A.	KESIMPULAN .....	46
B.	SARAN.....	47
<b>LAMPIRAN</b>	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Pegawai .....	5
Tabel 2. Daftar Isu Strategis .....	9
Tabel 3. Sasaran Strategis kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 .....	12
Tabel 4. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024 .....	15
Tabel 5. Perjanjian Kinerja.....	17
Tabel 6. Matriks Capaian Perjanjian Kinerja .....	22
Tabel 7. Capaian Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya.....	23
Tabel 8. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya.....	24
Tabel 9. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas .....	25
Tabel 10. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar .....	25
Tabel 11. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan.....	26
Tabel 12. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Petugas (Operator) Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat.....	27
Tabel 13. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS).....	28
Tabel 14. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan.....	28
Tabel 15. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Dasar .....	29
Tabel 16. Capaian Persentase ASN Kemenkumham yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi .....	30
Tabel 17. Daftar Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2023 .....	30
Tabel 18. Capaian Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya .....	32
Tabel 19. Capaian Persentase Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah .....	32
Tabel 20. Daftar Hasil Evaluasi Reaksi Peserta .....	33
Tabel 21. Capaian Ouput Kelulusan Peserta Pelatihan.....	33
Tabel 22. Matrik Kelulusan Peserta Pelatihan .....	33



Tabel 23. Perbandingan Capai Perjanjian Kinerja dari Tahun 2020-2023 .....	35
Tabel 24. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan.....	36
Tabel 25. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan.....	37
Tabel 26. Penyerapan Anggaran Tahun 2023 .....	38
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Anggaran dari Tahun 2020 s.d 2023 .....	39
Tabel 28. Daftar Revisi Anggaran di Tahun 2023.....	40
Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran.....	42
Tabel 30. Nilai Capaian E-Performance .....	43
Tabel 31. Daftar Penghargaan yang Ditemrима .....	44

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persebaran Pegawai di Wilayah Kerja.....	4
Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan .....	7
Grafik 3. Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya .....	24
Grafik 4. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas .....	25
Grafik 5. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar .....	26
Grafik 6. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar .....	26
Grafik 7. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Petugas (Operator) Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat .....	27
Grafik 8. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Basic Trauma And Cardiac Life Support (BTCLS) .....	28
Grafik 9. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan.....	29
Grafik 10. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Dasar .....	29

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badiklat Kumham Kepri .....	5
Gambar 2. Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Target.....	21
Gambar 3. Screenshot Nilai SMART .....	42
Gambar 4. Screenshot Nilai SMART .....	42
Gambar 5. Screenshot Aplikasi E-Performance .....	43
Gambar 6. Screenshot Aplikasi E-Monev.....	44



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LkjIP) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Semester II Tahun 2023 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran, dengan format penyusunan LkjIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertera dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024, dan disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 8.910.874.000,- (*delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) sementara Realisasi belanja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 8.867.255.838,- (*delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan*) atau 99.51 %.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk Semester II tahun 2023. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Semester II Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis teknologi informasi (e-gov PASTI Nyata), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi, pelatihan baik klasikal maupun e-learning dan penilaian kompetensi bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan para Aparatur Penegak Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Amanah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dengan tegas menyatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dengan mengacu kepada tugas dan fungsi yang diamanahkan tersebut, serta dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024, maka sangat terlihat jelas indikasi bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia aparatur bidang

Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kualitas, kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan untuk menjalankan upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa fungsi yang memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **2. Seksi Program dan Evaluasi**

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan dan penyusunan rencana, program dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

### **3. Seksi Penyelenggaraan**

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan persiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

# Wilayah Kerja Badiklat Kumham Kepri

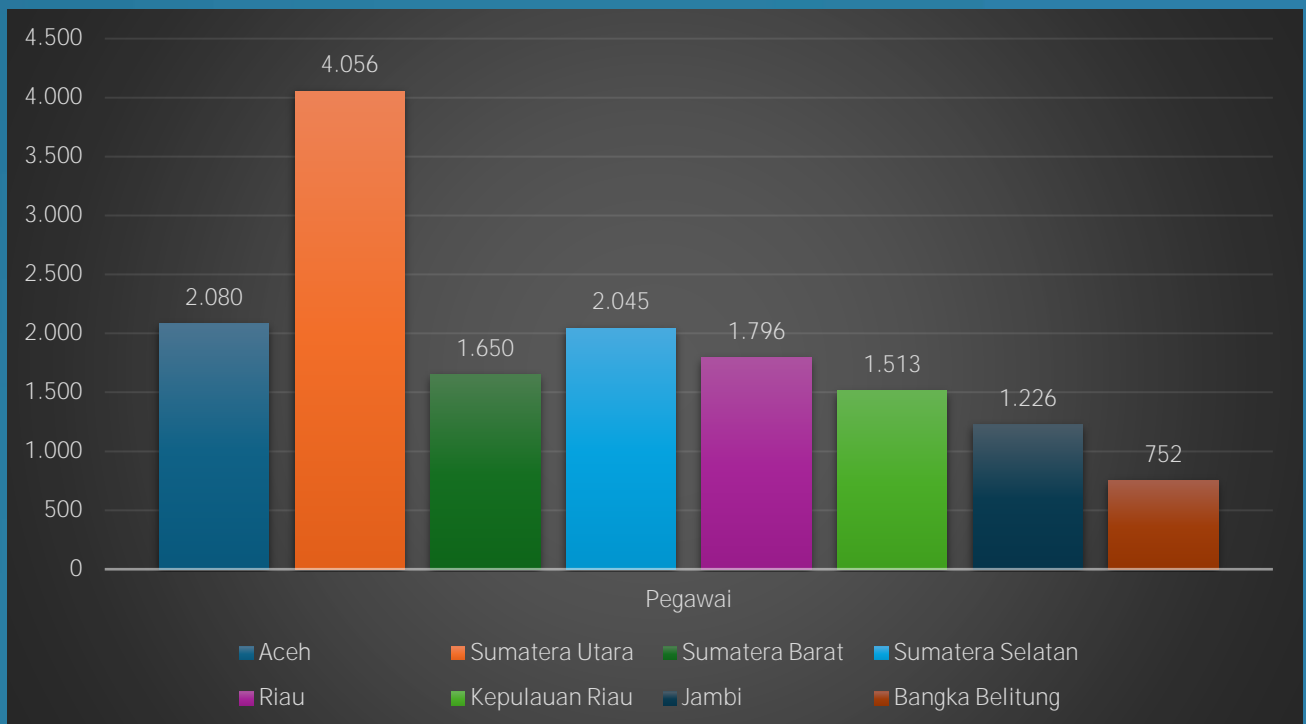


## 8 Provinsi

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Riau
6. Kepulauan Riau
7. Jambi
8. Bangka Belitung

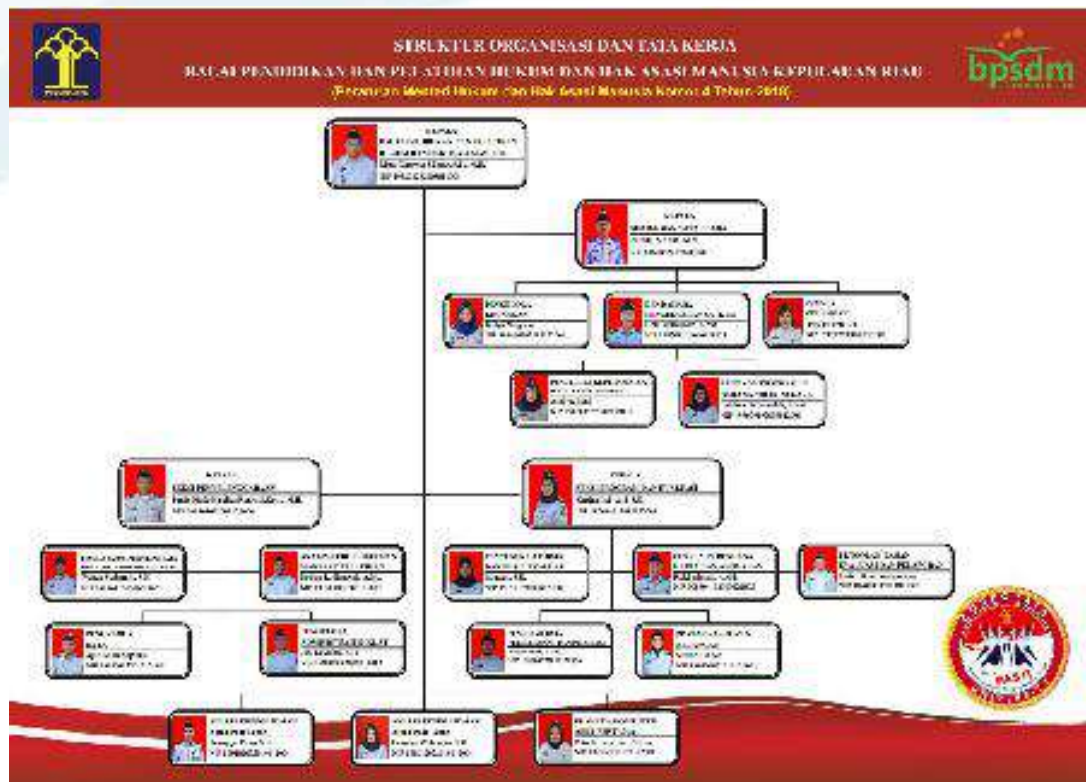
- ★ 8 Kantor Wilayah
- ★ 230 Satuan Kerja
- 👤 15.118 Pegawai

Grafik 1. Persebaran Pegawai di Wilayah Kerja





Gambar 1. Struktur Organisasi Badiklat Kumham Kepri



Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengembangan SDM didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 22 orang dengan berbagai latar belakang dan Pendidikan yang berbeda. Berikut Daftar nama-nama pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sebagai berikut:

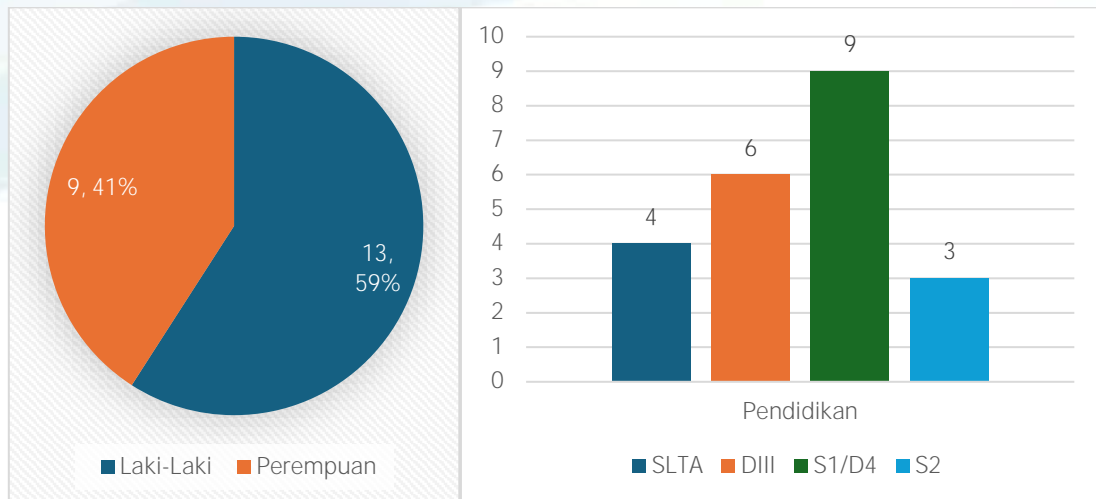
Tabel 1. Daftar Pegawai

NAMA	MASA KERJA (THN-BLN)	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	USIA (THN-BLN)
RINTO GUNAWAN SITORUS, S.H.M.H. NIP. 19820829 200801 1 001	14-10	IV/a	KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN RIAU	S2 Hukum	40-5
ZULKIFLI, S.Kom., M.Si. NIP. 19680527 199403 1 001	28-08	III/d	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	S2 Sains	54-8
PANDE MADE HANDIKA RIADY, S.Kom., M.H. NIP. 19850309 200912 1 006	12-11	III/d	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN	S2 Hukum	37-10
KARTINA INDRIYANI, S.E. NIP. 19760421 201012 2 001	11-10	III/d	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI	S1 Ekonomi	46-9
JONI LOVIANTO, S.H. NIP. 19820509 200801 1 012	14-11	III/b	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	S1 Hukum	40-8



NAMA	MASA KERJA (THN-BLN)	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	USIA (THN-BLN)
ISDAWATI, S.E. NIP. 19840803 200801 2 002	14-11	III/b	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	S1 Ekonomi	38-5
WANDA SYABANRIO, S.H. NIP. 19890320 200801 1 002	14-11	III/b	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	S1 Hukum	33-10
NOVIAN RUDIANSYAH, A. Md. NIP. 19851109 200912 1 003	12-11	III/b	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	DIII Teknik Informatika	37-2
RIZKIRRAHMAN, A. Md. NIP. 19880419 200912 1 003	12-11	III/b	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	DIII Teknik Informatika	34-9
HERU KURNIAWAN, A. Md. NIP. 19870921 201012 1 003	11-11	III/a	BENDAHARA PENGELUARAN SATKER	DIII Teknik Informatika	35-4
SOFYAN HADI, A. Md. NIP. 19890407 201012 1 006	11-11	III/a	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	DIII Teknik Informatika	33-9
DESWINA WULANDINI, S.H. NIP. 19861207 201901 2 001	3-10	III/b	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	S1 Hukum	36-1
TRIWIJAYA PUTRA, S.H. NIP. 19910103 201901 1 001	3-10	III/a	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	S1 Hukum	32-0
PARKER BONI SIMANGUNSONG, S.Pd. NIP. 19900924 201402 1 001	8-09	III/a	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	S1 Pendidikan	32-4
DESY JULIANI, S.E. NIP. 19920729 202012 2 001	1-11	III/a	PENATA KEUANGAN	S1 Ekonomi	30-6
PUTRI PERDANA SARI, S.Kom. NIP. 19950612 202012 2 001	1-11	III/a	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	S1 Komputer	27-7
ASHI ADISTARI NIP. 19850125 200703 2 001	15-10	III/a	PENGELOLA KEPEGAWAIAN/DATA KEPEGAWAIAN	SLTA Bahasa	38-0
INDRIANA NURKAMSIH, A. Md. NIP. 19960919 201901 2 001	4-0	II/d	PENGADMINISTRASI BARANG MLIK NEGARA	DIII Akuntansi	26-4
HAYDEN LUBIS NIP. 198910292012121001	10-1	II/c	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MLIK NEGARA	SLTA	33-3
WIDYA NINGRUM NIP. 19940620 201212 2 001	09-11	II/c	PENGELOLA KEUANGAN	SLTA IPA	28-7
AGUS SALIMSAPUTRA NIP. 19920817 201212 1 001	09-11	II/c	PENGELOLA DATA	SLTA REKAYASA PERANGKAT LUNAK	30-5
SISNIARTI, A.md NIP. 19940405 202012 2 002	1-11	II/c	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	DIII	28-9

Grafik 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan



### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembuatan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) ini dibuat adalah untuk menyajikan informasi yang akurat dan terperinci tentang kinerja Badikat Kumham Kepri. Hal tersebut bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan dan pimpinan di unit Eselon I yaitu BPSDM Hukum dan HAM dalam mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada penerima layanan dalam hal ini pegawai di lingkungan kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

LKJIP dibuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat dan penerima layanan. Dengan menyajikan informasi yang jelas tentang kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi, masyarakat dan penerima layanan dapat melihat bagaimana Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau telah mencapai tujuannya dan bagaimana dana yang disediakan telah digunakan dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Terakhir, laporan kinerja instansi pemerintah juga bertujuan untuk mengukur kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau secara obyektif dan menentukan area-area yang perlu ditingkatkan. Ini membantu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dan para pemangku kebijakan di atasnya untuk menetapkan prioritas dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja Balai

Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau ditahun yang akan datang.

#### **D. ASPEK STRATEGIS**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 70 menyatakan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi dimaksud dapat berupa Pendidikan dan Pelatihan, seminar, kursus, penataran Bimbingan Teknis (Bimtek) dan praktik kerja di instansi lain serta pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama satu tahun.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Hukum dan HAM dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM, ditugaskan melakukan pengembangan SDM bagi Aparatur Hukum dan HAM.

Dengan menyadari amanahnya untuk menjadi leading sector di bidang pengembangan sumber daya manusia Hukum dan HAM di wilayah, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dituntut untuk dapat memenuhi kompetensi berbagai kebutuhan unit kerja pengembangan melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Bidang Hukum dan HAM. Selain hal tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM. Hal ini merupakan tantangan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas agar lebih berkualitas, cerdas, terampil dan bernurani melalui pengembangan kompetensi.

Dalam upaya mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dibawah Arahan BPSDM Hukum dan HAM mentransformasi organisasi dari penyelenggara program pengembangan SDM menjadi KemKumHAM Corporate University. Dalam konteks kelembagaan Corporate University tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi

Manusia Kepulauan Riau sesuai dengan arahan BPSDM Hukum dan HAM berupaya melaksanakan programnya dengan berpedoman pada pendekatan competency-based human resources management system (CBHRM), serta dengan mengacu kepada visi, misi dan sasaran Kementerian Hukum dan HAM.

## E. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa kendala yang dihadapi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang menjadi isu strategis untuk mencapai target kinerjanya, antara lain:

*Tabel 2. Daftar Isu Strategis*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Isu
Meningkatkan Kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	Belum adanya pedoman atau instrumen dalam mengukur peningkatan kinerja bagi alumni pelatihan teknis dari BPSDM Hukum dan HAM
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Belum meratanya kesempatan ASN diwilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang mendapat pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan klasikal maupun non klasikal
	Persentase Alumni Pelatihan yang sudah	Masih terdapat peserta yang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Isu
	melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	mengikuti pelatihan khususnya pelatihan teknis yang jabatannya kurang relevan dengan pelatihan yang diikuti
	Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih belum memiliki sarana dan prasarana pelatihan sehingga penyelenggaraan pelatihan masih menggunakan hotel atau Balai Pelatihan Kesehatan yang kadang-kadang juga dipakai untuk berbagai kegiatan</li> <li>2. Masih belum adanya modul dari beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Kepri</li> </ol>
Penyelenggaraan Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus	Masih terdapat peserta pelatihan yang tidak serius mengikuti pelatihan sehingga



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Isu
	Mengikuti Pelatihan di Wilayah	menyebabkan peserta tidak lulus pelatihan

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Semester II Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum pada organisasi dengan penekanan pada aspek peran strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta strategis untuk organisasi

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, dan perjanjian kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian capaian kinerja pada setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta perbandingan capaian kinerja. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Semester II Tahun 2023 terkait dengan tugas pokok dan tugas strategis lainnya.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Semester II Tahun 2023 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Tahun 2020-2024 diharapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin baik serta profesional, aparaturnegara di pusat dan daerah semakin mampu mendukung pembangunan nasional seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017.

Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Kemenkumham menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:

*Tabel 3. Sasaran Strategis kementerian Hukum dan HAM 2020-2024*

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Pemangku Kepentingan	<b>Sasaran Strategis 1 (SS1):</b> Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	<b>Sasaran Strategis 2 (SS2):</b> Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		yang melaksanakan program aksi HAM
Bisnis Proses Internal	<b>Sasaran Strategis 3 (SS3):</b> Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	<b>Sasaran Strategis 4 (SS4):</b> Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan Penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase mantan narapidan yang terampil dan bersertifikat 4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan 5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
	<b>Sasaran Strategis 5 (SS5):</b> Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase penegakkan hukum Keimigrasian yang maksimal
	<b>Sasaran Strategis 6 (SS6):</b> Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing masing wilayah 2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<b>Sasaran Strategis 7 (SS7):</b> Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	<b>Sasaran Strategis 8 (SS8):</b> Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Korupsi
	<b>Sasaran Strategis 9 (SS9):</b> Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi
	<b>Sasaran Strategis 10 (SS10):</b> Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Anggaran (Keuangan)	<b>Sasaran Strategis 11 (SS11):</b> Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	1. Nilai SMART 2. Nilai IKPA

Seperti yang tertuang dalam tabel diatas, salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM (Sasaran Strategis 7, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka BPSDM Hukum dan HAM menetapkan tujuan strategisnya yaitu Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University.

Arah kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai penjabaran dari Visi, Program Aksi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana strategis (Renstra) Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan turunan dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan

HA 2020-2024. Sasaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif Balanced Scorecard, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran. Sasaran strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dalam empat perspektif tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

*Tabel 4. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024*

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan

Perspektif	Sasaran Strategis
	bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI</li> <li>2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi</li> <li>3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola)</li> <li>4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir</li> <li>5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas</li> </ol>
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompetensi tinggi dan terkreditasi</li> <li>2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran</li> <li>3. Menjalin kerjasama sin</li> </ol>
Keuangan atau Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi, adalah dokumen berisikan penugasan dari Kepala BPSDM Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator



dan target. Melalui Perjanjian Kinerja inilah kinerja Balai Pendidikan Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja ini diselaraskan dengan rencana kinerja tahunan 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan melalui sasaran yang akan dicapai. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun 2023.

*Tabel 5. Perjanjian Kinerja*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%
		3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai	93%



		dengan kompetensi bidang tugasnya	
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terselenggaranya pelatihan di Wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	92%
No	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	94%
No	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	92%
2	Dukungan Layanan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 2. Jumlah laporan keuangan yang disusun 3. Nilai SMART 4. Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 2 95 2
3	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran gaji dan tunjangan 2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	95% 80%
No	Kegiatan	Anggaran	
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Rp. 8.910.874.000	
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3.355.356.000	
2	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 4.711.016.000	
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 844.502.000	

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau selaku Satuan Kerja (Satker) dari BPSDM Hukum dan HAM membantu dalam merealisasikan sasaran strategis dan sasaran program BPSDM Hukum dan HAM di Wilayah kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sesuai target indikator yang telah ditetapkan, namun ada beberapa poin perjanjian kinerja yang bukan merupakan tugas dan kewenangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau sehingga tidak dapat membantu BPSDM Hukum dan HAM dalam merealisasikannya, adapun poin-poin perjanjian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis indikator kinerja utama poin 1 yaitu Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, saat ini yang menjalankan tugas untuk penilaian kompetensi adalah Pusat Penilaian Kompetensi di BPSDM Hukum dan HAM;
2. Sasaran Program poin 1 Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dengan Indikator Kinerja Program yaitu Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan, saat ini yang menjalankan tugas Pendidikan untuk Keimigrasian dan Pemasarakatan adalah Politeknik Keimigrasian dan Politeknik Pemasarakatan;
3. Sasaran Program poin 2 Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM dengan Indikator Kinerja Program yaitu persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindak lanjuti oleh pengguna, saat ini yang menjalankan tugas penilaian kompetensi adalah Pusat Penilaian Kompetensi di BPSDM Hukum dan HAM.

Dengan demikian untuk selanjutnya pada pembahasan pada laporan ini terkait pencapaian perjanjian kinerja akan dijabarkan pencapaian perjanjian kinerja yang menjadi tugas dan fungsi serta kewenangan yang diemban oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia saja. Untuk perjanjian kinerja yang berupa sumber daya anggaran dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah terdapat perubahan anggaran pada KRO dari anggaran awal tahun 2023, namun jumlah pagu tidak mengalami perubahan.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### A.1 Capaian Perjanjian Kinerja

Sub Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut:

*Gambar 2. Rumus Perhitungan Persentase Pencapaian Target*

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	---	------	---	------------------------------

Keterangan:

Makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya makin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah.

#### A.1.1 Metode Pehitungan Realisasi Perjanjian Kinerja

Metode yang digunakan untuk mengukur realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan capaian Indikator Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya dan Indikator Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya menggunakan data Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP). Evaluasi ini dilakukan paling cepat 6 bulan setelah pelatihan berlangsung. Sehingga pelatihan yang diselenggarakan di atas bulan Juni baru bisa dievaluasi di Tahun berikutnya. Untuk Evaluasi Pasca Pelatihan Tahun 2023, pelatihan yang dievaluasi berasal dari pelatihan Tahun 2022. Pengumpulan data Evaluasi Pasca Pelatihan dilakukan dengan menggunakan gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Berdasarkan data deskriptif hasil kuantitatif untuk pelatihan teknis berdasarkan 3 (tiga) indikator peningkatan kinerja yang di ukur berdasarkan peningkatan 3 (tiga) jenis kompetensi yang dikuasai terdiri dari: skill (keterampilan), Knowledge (pengetahuan), dan attitude

(sikap). Tingkat peningkatan pemahaman dan penerapan terhadap materi pelatihan dalam kaitannya dengan bidang tugas pekerjaannya. Tingkat pemanfaatan alumni pelatihan pada unit/satuan kerja, yang dapat dilihat dari kesesuaian pelatihan yang diikuti sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan metode kualitatif dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja alumni dan unit organisasi.

2. Perhitungan Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi dihitung berdasarkan perbandingan antara pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan dengan target output yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 yaitu 3.000.
3. Perhitungan capaian Indikator Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan Tahun 2023 menggunakan data hasil evaluasi level 1 menggunakan model Kirkpatrick. Evaluasi level 1 digunakan untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pelatihan. Reaksi yang diukur bisa berupa perasaan, pendapat, atau tanggapan peserta terhadap pelatihan yang diikuti. Beberapa aspek yang dinilai oleh peserta meliputi aspek kurikulum pelatihan, penyelenggaraan hingga tenaga pengajar.

### A.1.2 Matriks Capaian Perjanjian Kinerja

*Tabel 6. Matriks Capaian Perjanjian Kinerja*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%	95,54%	100,57%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%	178,77%	192,22%
		2. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan	93%	93,63%	102%



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
		kompetensi bidang tugasnya			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di wilayah	92%	92,56%	100,01%
No	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	92%	99,91%	109%
2	Dukungan Layanan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	1	100%
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2	2	100%
		3. Nilai SMART	95	99,90	105,16%
		4. Jumlah Laporan Capaian Kinerja	2	2	100%
3	Layanan Perkantoran	3. Realisasi Pembayaran gaji dan tunjangan	95%	99,95%	105,21%
		4. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%	99,67%	124,59%

### A.1.3 Analisa Capaian Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya

*Tabel 7. Capaian Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya*

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%	95,54%	100,57%

Peningkatan Kinerja dari alumni pelatihan teknis diukur berdasarkan peningkatan kompetensi teknis yang didapatkan peserta dari pelatihan yang diikuti dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

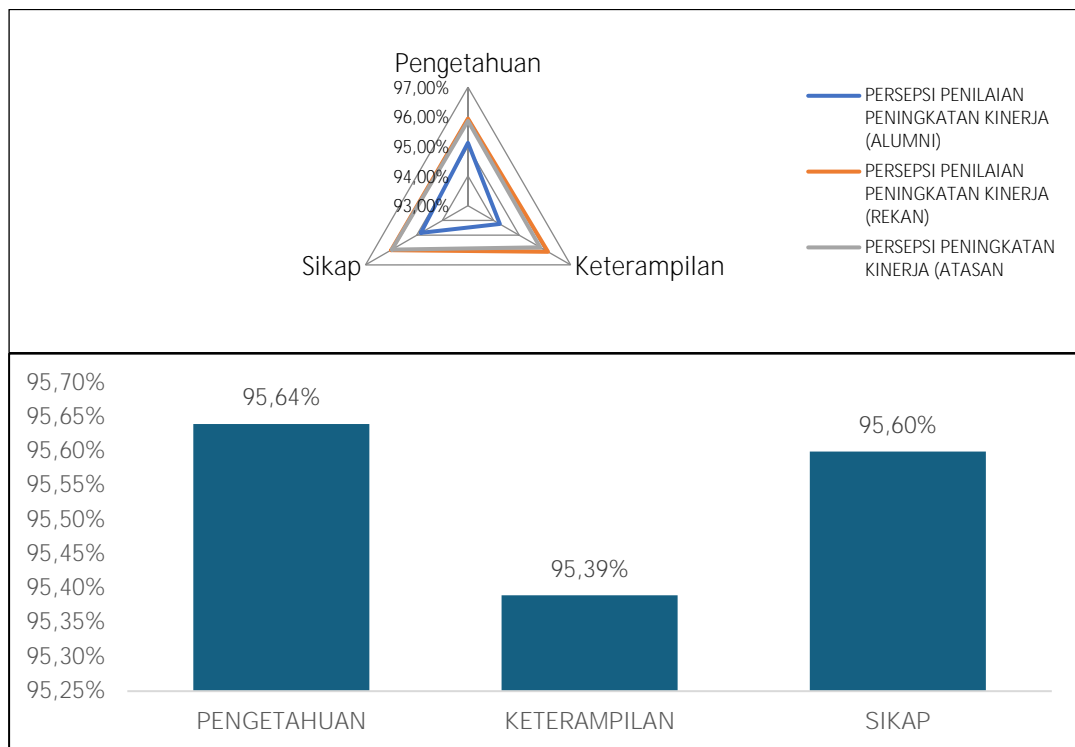


oleh alumni, yang terdiri dari Skill (Keterampilan), Knowledge (Pengetahuan), dan Attitude (Sikap). Penilaian tersebut diukur berdasarkan persepsi Alumni, Atasan Langsung dan Rekan Kerja. Dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 8. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya*

No	Persepsi Penilaian Peningkatan Kinerja	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
1	Alumni Pelatihan	95,12%	94,24%	94,84%
2	Rekan Kerja	95,94%	96,12%	96,00%
3	Atasan Langsung	95,86%	95,81%	95,97%
	Rata-Rata	95,64%	95,39%	95,60%
% Akhir			95,54%	

*Grafik 3. Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya*



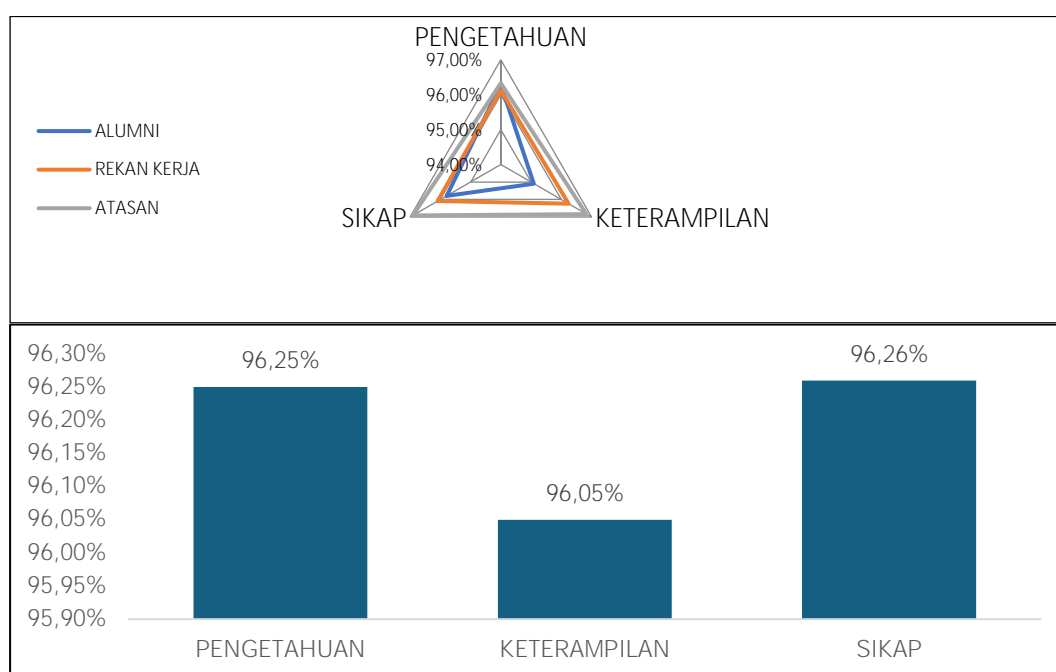
Adapun rincian untuk masing-masing pelatihan teknis yang menjadi objek yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

### A.1.3.1 Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

*Tabel 9. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas*

Indikator	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Alumni	96,29%	95,09%	95,79%
Rekan	96,13%	96,24%	96,09%
Atasan	96,33%	96,83%	96,91%
	<b>96,25%</b>	<b>96,05%</b>	<b>96,26%</b>
<b>RATA-RATA</b>	<b>96,19%</b>		

*Grafik 4. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas*

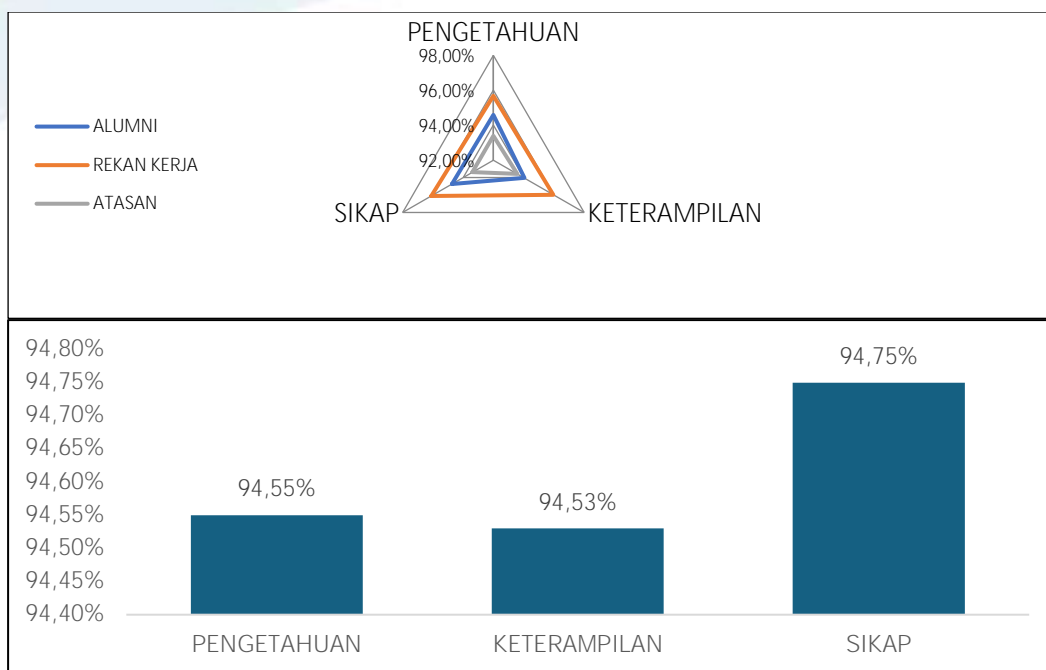


### A.1.3.2 Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

*Tabel 10. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar*

Indikator	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Alumni	94,59%	94,05%	94,74%
Rekan	95,68%	95,96%	96,11%
Atasan	93,39%	93,58%	93,39%
	<b>94,55%</b>	<b>94,53%</b>	<b>94,75%</b>
<b>RATA-RATA</b>	<b>94,61%</b>		

**Grafik 5. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar**

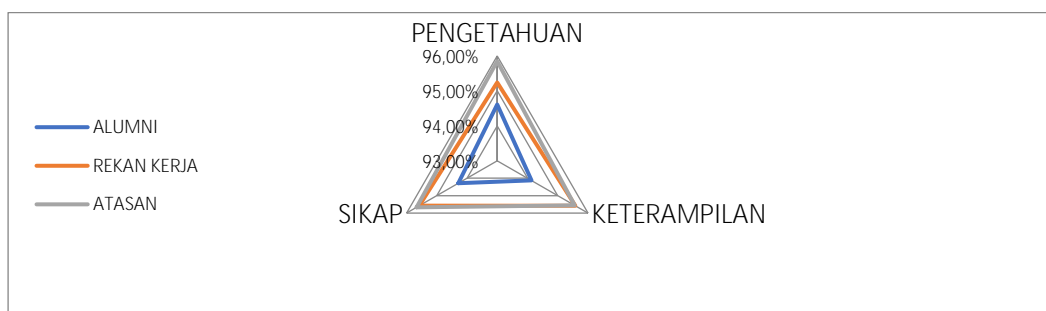


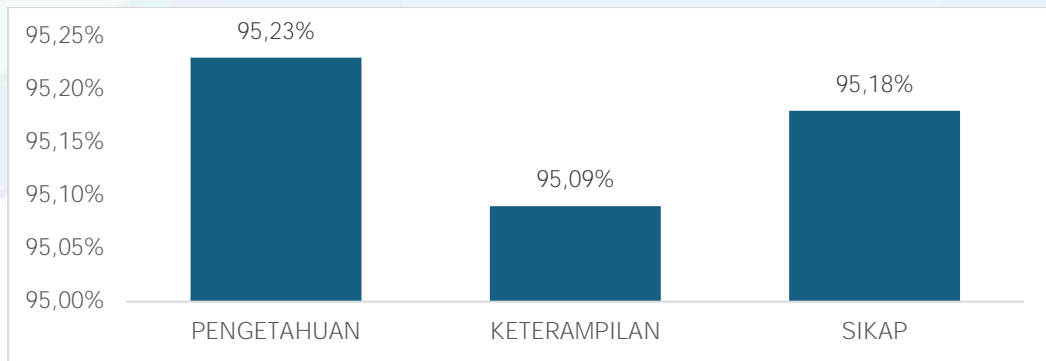
### A.1.3.3 Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

**Tabel 11. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan**

	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Alumni	94,61%	94,13%	94,29%
Rekan	95,24%	95,58%	95,58%
Atasan	95,85%	95,56%	95,67%
<b>Rata-Rata</b>	<b>95,23%</b>	<b>95,09%</b>	<b>95,18%</b>

**Grafik 6. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar**



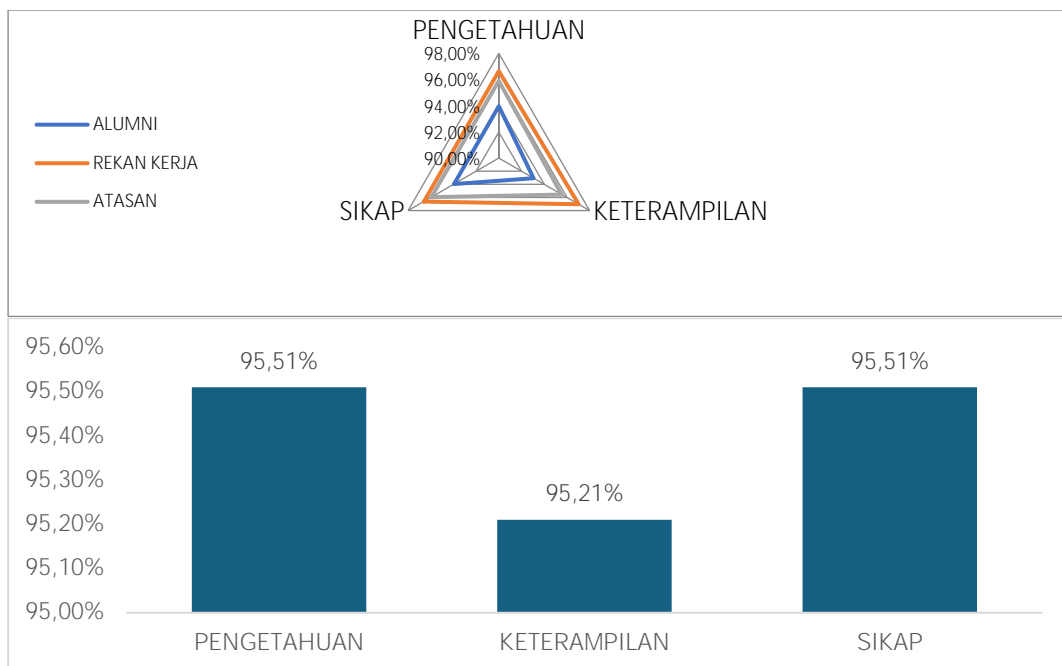


#### A.1.3.4 Pelatihan Petugas (Operator) Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

*Tabel 12. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Petugas (Operator) Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat*

	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Alumni	93,97%	93,06%	93,95%
Rekan	96,65%	97,04%	96,61%
Atasan	95,90%	95,54%	95,96%
	<b>95,51%</b>	<b>95,21%</b>	<b>95,51%</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>95,41%</b>		

*Grafik 7. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Petugas (Operator) Pelaksana Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat*

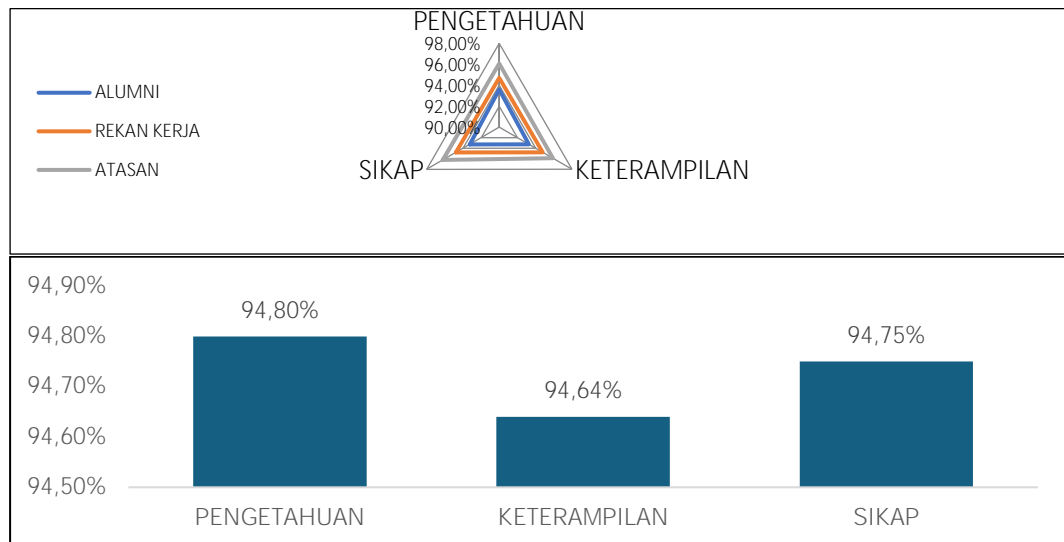


### A.1.3.5 Pelatihan Basic Trauma And Cardiac Life Support (BTCLS) Metode Blended Learning

*Tabel 13. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support (BTCLS)*

	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Alumni	93,60%	93,25%	93,25%
Rekan	94,71%	94,78%	94,78%
Atasan	96,08%	95,90%	96,23%
	<b>94,80%</b>	<b>94,64%</b>	<b>94,75%</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>94,73%</b>		

*Grafik 8. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Basic Trauma And Cardiac Life Support (BTCLS)*



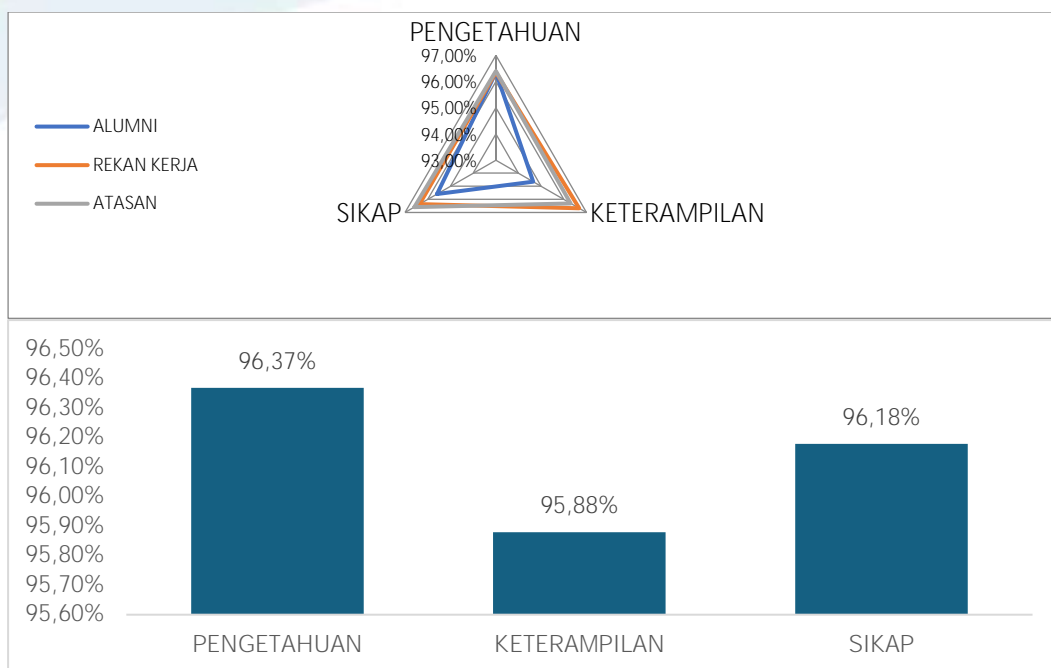
### A.1.3.6 Pelatihan Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

*Tabel 14. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan*

	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Alumni	96,35%	94,65%	95,59%
Rekan	96,35%	96,68%	96,36%
Atasan	96,40%	96,30%	96,59%
	<b>96,37%</b>	<b>95,88%</b>	<b>96,18%</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>96,14%</b>		



**Grafik 9. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Pelatihan Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Lanjutan**

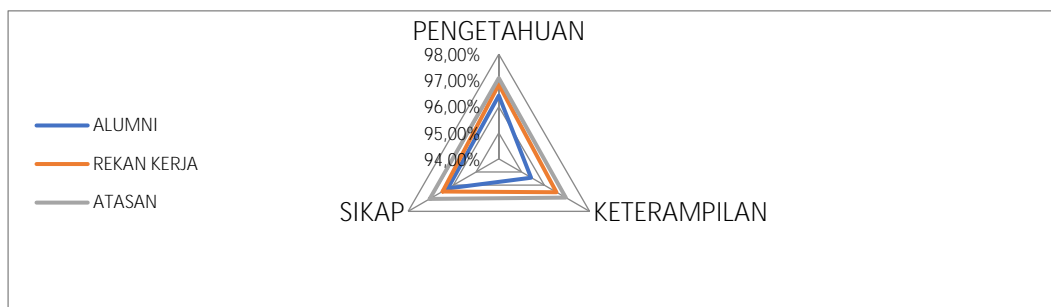


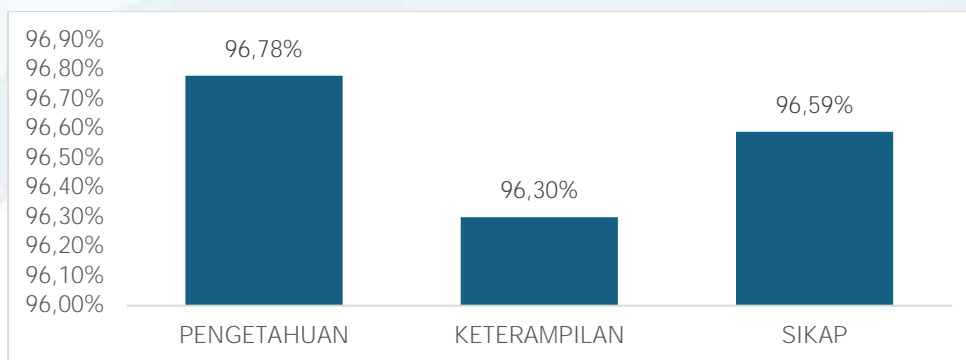
#### A.1.3.7 Pelatihan Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Dasar Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

**Tabel 15. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Dasar**

	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
Alumni	96,42%	95,42%	96,25%
Rekan	96,84%	96,54%	96,48%
Atasan	97,09%	96,95%	97,05%
<b>Rata-Rata</b>	<b>96,78%</b>	<b>96,30%</b>	<b>96,59%</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>96,56%</b>		

**Grafik 10. Hasil EPP Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Untuk Teknis Petugas Pengamanan Tingkat Dasar**





#### A.1.4 Analisa Capaian Persentase ASN Kemenkumham yang Mendapatkan pengembangan Kompetensi

*Tabel 16. Capaian Persentase ASN Kemenkumham yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi*

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%	178,77%	192,22%

Catatan: target output pelatihan Tahun 2023 sebanyak 3000 peserta

*Tabel 17. Daftar Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2023*

No	Pelatihan	Metode	Output Peserta	Keterangan
1	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas (PJJ)	PJJ	149	4 Angkatan
2	Sosialisasi PK Bangkom	Klasikal	53	1 Angkatan
3	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (PJJ)	PJJ	80	2 Angkatan
4	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	Blended	90	3 Angkatan
5	Webinar Pola Karir dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasarakatan dan Pengamanan Pemasarakatan	Webinar	1.141	1 Angkatan
6	Webinar peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik melalui implementasi reformasi birokrasi tematik dan mitigasi maladministrasi	Webinar	578	1 Angkatan
7	Pelatihan Protokoler	Klasikal	60	2 Angkatan
8	Webinar Peningkatan Profesionalisme SDM dalam	Webinar	562	1 Angkatan

No	Pelatihan	Metode	Output Peserta	Keterangan
	Rangka Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di Indonesia			
9	Pelatihan Teknik dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan (Klasikal)	Klasikal	70	2 Angkatan
10	Pelatihan Strategi Hubungan Masyarakat Biro Humas Hukum dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Informasi di Era Digital (MOOC)	MOOC	127	1 Angkatan
11	Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (MOOC)	MOOC	77	1 Angkatan
12	Pelatihan Kesamaptaan (Klasikal)	Klasikal	80	2 Angkatan
13	Pelatihan Teknis Pemasarakatan Pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib (PJJ)	PJJ	40	1 Angkatan
14	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (Klasikal)	Klasikal	40	1 Angkatan
15	Penumpukan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan negara (Klasikal)	MOOC	183	1 Angkatan
16	Analisis dan Evaluasi Perundang-undangan	MOOC	172	1 Angkatan
17	Penyusunan Peta Penyuluh Hukum	MOOC	72	1 Angkatan
18	Webinar Nasional Strategi Komunikasi Efektif Dalam Budaya Kerja dan Pelayanan	Webinar	1.499	1 Angkatan
19	Appostille (MOOC)	MOOC	240	1 Angkatan
20	Workshop Manajemen Krisis	Workshop	50	1 Angkatan
	<b>Total</b>		<b>5.363</b>	<b>29 Angkatan</b>

### A.1.5 Analisa Capaian Persentase Alumni Pelatihan yang Sudah Melaksanakan Tugas Sesuai Dengan Bidang Tugasnya

*Tabel 18. Capaian Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya*

Indikator Kinerja Program			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya			93%	93,63%	102%
Pelatihan	Populasi	Responden	Alumni yang sudah melaksanakan tugas sesuai kompetensi bidang tugasnya		Persentase
Pelatihan Teknis	480	471	441		93,63%

Pengukuran dilakukan berdasarkan rekapitulasi hasil survey yang dijawab oleh responden yang merupakan atasan langsung alumni pada Evaluasi Pasca Pelatihan, dimana dari jumlah keseluruhan 480 Alumni pelatihan teknis yang menjadi objek yang dievaluasi, terdapat 471 (98,13%) responden yang menjawab. Berdasarkan rekapitulasi hasil pengolahan data, didapatkan sebanyak 441 (93,63%) responden menjawab pelatihan yang diikuti oleh alumni tersebut sesuai dengan bidang tugasnya saat ini.

### A.1.6 Analisa Capaian Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah

*Tabel 19. Capaian Persentase Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah*

Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi (Hasil Evaluasi Reaksi)	Capaian
Persentase Kualitas penyelenggaraan pelatihan di Wilayah	92%	92,56%	100,01%

Tabel 20. Daftar Hasil Evaluasi Reaksi Peserta

No	Nama Pelatihan	Angkatan	Dimensi Evaluasi Reaksi			Rata-Rata %
			Tenaga Pengajar	Materi Pembelajaran	Penyelenggaraan	
1	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas (PJJ)	III	92,93	93,58	92,71	93,07
		IV	88,75	89,27	87,73	88,58
		V	94,89	93,43	92,66	93,66
		VI	90,72	93,18	91,2	91,7
2	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (PJJ)	IV	89,95	91,66	89,68	90,43
		V	93,44	91,42	92,44	92,43
3	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar (Blended)	III	92,72	96,28	95,7	94,9
		IV	94,24	96,81	96,2	95,75
		V	93,39	95,43	94,27	94,36
4	Pelatihan Protokoler (Klasikal)	II	93,04	96,28	95,65	94,99
		III	93,48	96,5	95,94	95,31
5	Pelatihan Teknis dan Strategi Membangun Publikasi Pelayanan	IV	91,76	92,82	90,53	91,7
		V	92,05	94,92	92,96	93,31
6	Pelatihan Kesamaptaan	I	90,51	91,08	89,22	90,27
		II	89,35	87,35	87,26	87,99
7	Pelatihan Teknis Pemasarakatan Pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib	I	91,67	94,05	89,91	91,88
9	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara	I	94,46	95,48	95,58	95,17
<b>Rata-Rata</b>						<b>92,56</b>

### A.1.7 Matriks Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan

Tabel 21. Capaian Ouput Kelulusan Peserta Pelatihan

No	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	92%	99,91%	109%

Tabel 22. Matrik Kelulusan Peserta Pelatihan

No	Pelatihan	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Keterangan
1	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat (PJJ)	149	149	-	-
2	Sosialisasi PK Bangkom	53	53	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
3	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (PJJ)	80	77	3	-



No	Pelatihan	Jumlah Peserta	Lulus	Tidak Lulus	Keterangan
4	Pelatihan Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar (Blended)	90	89	1	-
5	MOOC Pemeriksa Keimigrasian di TPI	77	77	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
6	Webinar Pola Karir dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Masyarakat dan Pengamanan Masyarakat	1.141	1.141	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
7	Webinar peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik melalui implementasi reformasi birokrasi tematik dan mitigasi maladministrasi	578	578	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
8	Pelatihan Protokoler (Klasikal)	60	60	-	-
9	Webinar Peningkatan Profesionalisme SDM dalam Rangka Penanganan Pengungsi Luar Negeri dan Pencari Suaka di Indonesia	562	562	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
10	MOOC Pelatihan Strategi Hubungan Masyarakat Biro Humas, Hukum dan Kerjasama dalam Pengelolaan Informasi di Era Digital	127	127	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
11	Pelatihan Teknis dan Strategis Membangun Publikasi Pelayanan (Klasikal)	70	70	-	-
12	Pelatihan Kesamaptaan (Klasikal)	80	80	-	-
13	Pelatihan Teknis Pemasayrakatan pemeriksaan Pelanggaran Tata Tertib (PJJ)	40	39	1	-
14	Webinar Nasional Strategi Komunikasi Efektif Dalam Budaya Kerja dan Pelayanan	1.499	1.499	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
15	MOOC Penumpukan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan negara	183	183	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
16	Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (Klasikal)	40	40	-	-
17	MOOC Analisis dan Evaluasi Perundang-undangan	172	172	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
18	MOOC Penyusunan Peta Penyuluh Hukum	72	72	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
19	MOOC Apostille	240	240	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
20	Workshop Manajemen Krisis	50	50	-	Tidak ada Mekanisme Lulus/Tidak Lulus
	Jumlah	5.363	5.358	5	
Persentase kelulusan			99,91%		

## A.2 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja

Tabel 23. Perbandingan Capai Perjanjian Kinerja dari Tahun 2020-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	-	-	-	85%	98,74%	116,16%	90%	96.18%	107%	95%	95,54%	100,57%
No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM yang mendapatkan pengembangan kompetensi	-	-	-	90%	100%	111,1%	92%	143.2%	156%	93%	178,77%	192,22%
		2. Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	-	-	-	90%	98,96%	109,96%	92%	93.4%	102%	93%	93,63%	102%
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	80%	92,65%	115,8%	85%	93,70%	110,24%	90%	93.61%	104%	92%	92,56%	100,01%

### A.3 Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Tabel 24. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Aspek	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan
Perjanjian Kinerja	1. Mengadakan rapat rutin bulanan untuk memonitoring pelaksanaan rencana kinerja masing-masing tuisi sesuai dengan disbursmenplant	1 Menyesuaikan kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan oleh wilayah kerja sehingga jenis pelatihan tidak sesuai dengan disbursement plan
	2. persentase peserta yang lulus pelatihan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	2 terdapat beberapa peserta pelatihan yang tidak lulus pelatihan saat mengikuti pelatihan
	3 Terselenggaranya Pelatihan yang baik dan berkelanjutan guna menjaga kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	3 Penyelenggaraan Pelatihan yang tidak optimal dan kurangnya evaluasi berkala dapat menyebabkan program pelatihan yang tidak efektif. Tanpa pemantauan yang terus-menerus dan perbaikan berkelanjutan, penyelenggaraan Pelatihan tidak dapat berjalan dengan baik
Anggaran	1 Memonitoring selalu rencana kegiatan pelaksanaan Diklat sesuai dengan kalender kerja dengan melakukan rapat internal bulanan.	Belum terindikasi adanya kegagalan
	2 Pengelola keuangan saling berkolaborasi dengan selalu berkoordinasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan diklat dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan mengacu pada Rencana Penggunaan Dana serta selalu berkoordinasi dengan seksi-seksi dalam rangka menjaga konsistensi IKPA sebagai	Belum terindikasinya ada kegagalan

Aspek	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan
	antisipasi terjadinya deviasi yg melebihi batas toleransi.	

#### A.4 Kendala dan Strategi Pengendalian

Tabel 25. Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

No	Kendala Dalam Pencapaian Kinerja	Dampak yang ditimbulkan	Strategi Pengendaliannya
1	Belum adanya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menyelenggarakan pelatihan klasikal	Kurang optimal penyelenggara pelatihan	pengusulan belanja modal berupa gedung dan bangunan kantor, asrama dan ruang kelas dalam mendukung penyelenggaraan yang lebih optimal
2	Belum memiliki widyaiswara	Tidak adanya widyaiswara yang berkualifikasi dan berpengalaman, pelatihan tidak akan mencapai standar kualitas yang diinginkan. Ini dapat menghambat pencapaian hasil yang optimal dari program pelatihan	Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak internal Kementerian Hukum dan HAM maupun dari external dalam penyediaan tenaga pengajar.
3	Wilayah kerja yang luas meliputi 8 Kantor wilayah Hukum dan HAM, dengan jumlah pegawai Badiklat berjumlah 22 orang	jumlah pegawai yang terbatas menyebabkan efisiensi dan produktivitas pegawai menjadi menurun, Kinerja staf yang terganggu mengakibatkan pekerjaan yang bersifat administratif maupun substantif akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diharapkan	Mengajukan permohonan penambahan pegawai
4	Jumlah output peserta pelatihan tahun 2023 berjumlah 3000	pencapaian output peserta pelatihan tidak akan bisa dilaksanakan dengan secara optimal hanya dengan metode klasikal	Menerapkan berbagai metode pembelajaran, mulai dari klasikal, Blended, PJJ, MOOC, COP, E-Leraning dan Webinar

## B. REALISASI ANGGARAN

### B.1 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 26. Penyerapan Anggaran Tahun 2023*

Kode	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Capaian
		(Rp)	(Rp)	(%)
<b>5249</b>	<b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</b>			
5249.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.472.760.000	4.459.266.938	99,70%
5249.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.840.765.000	3.817.457.400	99,39%
5249.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	597.349.000	590.531.500	98,86%
<b>Jumlah</b>		<b>8.910.874.000</b>	<b>8.867.255.838</b>	<b>99,51%</b>

Terdapat sebesar 43.618.162 (0,49%) anggaran yang tidak terserap terdiri dari Layanan Dukungan Manajemen Internal sebesar 13.493.062, Layanan Manajemen SDM Internal sebesar 23.307.600, Layanan Manajemen Kinerja Internal sebesar 6.817.500. Adanya sisa anggaran yang tidak terserap karena terdapat sisa anggaran dari realisasi anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan.



## B.2 Perbandingan Realisasi Anggaran

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Anggaran dari Tahun 2020 s.d 2023

2020				2021				2022				2023			
Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Capaian	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Capaian	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Capaian	Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	Capaian
	(Rp)	(Rp)	(%)		(Rp)	(Rp)	(%)		(Rp)	(Rp)	(%)		(Rp)	(Rp)	(%)
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah				Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah				Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah							
Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	930.720.000	891.626.371	95,8	Layanan Perkantoran	3.352.952.000	3.229.525.132	96,32	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.215.133.000	4.200.165.513	99,64	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.472.760.000	4.459.266.938	99,70%
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	794.022.000	736.964.300	92,81	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	512.601.000	503.636.900	98,25	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.173.765.000	1.164.398.000	99,20	Layanan Manajemen SDM Internal	3.840.765.000	3.817.457.400	99,39%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	628.987.000	574.431.825	91,33	Layanan Umum	201.966.000	200.134.900	99,09	Layanan Manajemen SDM Internal	5.559.071.000	5.472.132.500	98,44	Layanan Manajemen Kinerja Internal	597.349.000	590.531.500	98,86%
Layanan Perkantoran	2.266.391.000	2.207.614.133	97,41	Layanan Sarana Internal	2.042.600.000	2.010.232.000	98,42	Layanan Manajemen Kinerja Internal	486.510.000	483.952.800	99,47				
				Layanan SDM	258.622.000	254.900.150	98,56								
				Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	159.480.000	147.894.500	92,74								
				Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	4.327.085.000	4.293.014.400	99,21								
Jumlah	4.620.120.000	4.410.636.629	95,47	Jumlah	10.855.306.000	10.642.298.492	98,01	Jumlah	11.434.479.000	11.320.648.813	99	Jumlah	8.910.874.000	8.867.255.838	99,51%

### B.3 Revisi Anggaran

pada Tahun 2023 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau telah melakukan 9 kali revisi anggaran. Berikut rincian revisi yang telah dilakukan:

*Tabel 28. Daftar Revisi Anggaran di Tahun 2023*

Revisi ke-	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
9	27 Desember 2023	8.910.874.000	Penyamaan data Revisi POK
8	29 November 2023	8.910.874.000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga nilai IKPA khususnya indikator deviasi halaman III DIPA</li><li>- Pergeseran anggaran dalam satu KRO 5249.EBA dari RO EBA.956 Layanan BMN ke RO EBA.994.002 Operasional pemeliharaan kantor sebesar Rp.139.880.000,-. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya serah terima barang milik negara berupa Gedung dan bangunan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau.</li><li>- Penyamaan data revisi POK</li></ul>
7	12 Oktober 2023	8.910.874.000	<p>Revisi Kanwil DJPB</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menjaga nilai IKPA khususnya indikator deviasi halaman III DIPA</li><li>- Pergeseran dari KRO 5249.EBC layanan manajemen SDM ke KRO 5249.EBA layanan Dukman Internal RP. 321.397.000 untuk memenuhi biaya operasional perkantoran dan pagu minus belanja pegawai</li><li>- Pergeseran anggaran dari KRO 5249.EBC Layanan Manajemen SDM Internal ke KRO 5249.EBD Layanan Manajemen kinerja internal sebesar Rp. 122.854.000 untuk memenuhi biaya pada RO layanan perencanaan dan Anggaran dan RO layanan pemantauan dan evaluasi</li></ul>

Revisi ke-	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
			- Penyamaan data revisi POK
6	24 Agustus 2023	8.910.874.000	Revisi DIPA Pembukaan Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp. 200.000.000
5	13 Juli 2023	8.910.874.000	Revisi Kanwil DJPB <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga nilai IKPA khususnya indicator deviasi halaman III DIPA</li> <li>- Pergeseran dari KRO 5249.EBC layanan manajemen SDM ke KRO 5249.EBA layanan Dukman Internal RP. 85.237.000 untuk memenuhi biaya operasional perkantoran dan pagu minus belanja pegawai</li> <li>- Pergeseran anggaran dari KRO 5249.EBC Layanan Manajemen SDM Internal ke KRO 5249.EBC Layanan Manajemen SDM internal sebesar Rp. 284.770.000 untuk memenuhi biaya pada RO layanan Pendidikan dan pelatihan</li> <li>- Penyamaan data revisi POK</li> </ul>
4	11 April 2023	8.910.874.000	Revisi Kanwil DJPB, Pemutakhiran data Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA
3	15 Februari 2023	8.910.874.000	Revisi Kanwil DJPB, Pergeseran anggaran dari KRO 5249.EBC Layanan Manajemen SDM Internal ke KRO 5249.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Sebesar Rp. 710.770.000,-
2	06 Februari 2023	8.910.874.000	Revisi Kanwil DJPB, Pemutakhiran data Revisi POK dan penyesuaian Halaman III DIPA
1	24 Desember 2022	8.910.874.000	Revisi DJA, Kebijakan Automatic Adjustment (blokir anggran) sebanyak Rp. 200.000.000,- Berdasarkan surat sekretaris BPSDM Hukum dan HAM No.SDM.1-PR.01.04-223, 19 Desember 2022
<b>Pagu Awal</b>	<b>30 November 2022</b>	<b>8.910.874.000</b>	

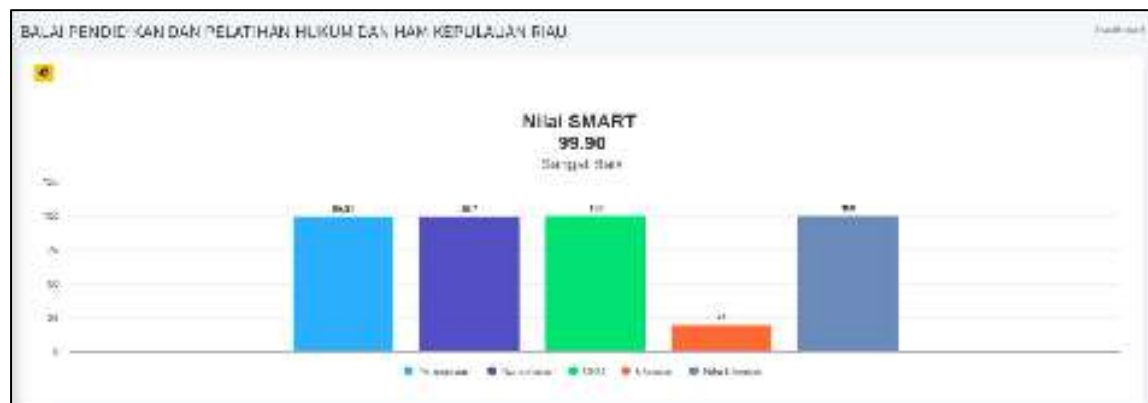
### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. Berikut capaian Kinerja Anggaran dari Tahun 2020 s.d 2023:

Tabel 29. Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran

Tahun	IKPA	SMART	Bobot IKPA (40%)	Bobot SMART (60%)	Capaian Kinerja Anggaran
2020	98,78	99,20	39,51	59,52	99,03
2021	93,54	87,24	37,42	52,34	89,76
2022	96,55	95,22	38,62	57,13	95,75
2023	100	99,90	40,00	59,94	99,94

Gambar 3. Screenshot Nilai SMART



Gambar 4. Screenshot Nilai SMART

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Periode: Desember																
No	Kode KUPN	Kode BA	Kode Sub-Ba	Jenis Sub-Ba	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kategori	Nilai Akhir (Nilai Total/Kategori Bobot)
						Bobot SPN	Dari Nilai di DPA	Preparasi Anggaran	Saluran Kontribusi	Perencanaan Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP	Disposisi SPN				
1	131	101	101010	KPAW POKOK BANGUNAN DAN ATAS HASIL PERJALANAN KEM KEPULAUAN RIAU	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
					Revisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Nilai Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
					Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			

## D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### D.1 E-Performance

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Berikut Capaian Kinerja Berdasarkan Aplikasi E-Performance:

*Tabel 30. Nilai Capaian E-Performance*

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)
1	Terselenggaranya Pelatihan di Wilayah	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	109%

Pengukuran capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan. Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau tahun 2023 dinyatakan berhasil sebab realisasi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan melampaui target dan dapat dilihat pada aplikasi e-performance dengan alamat <https://eperformance.kemenkumham.go.id>.

*Gambar 5. Screenshot Aplikasi E-Performance*

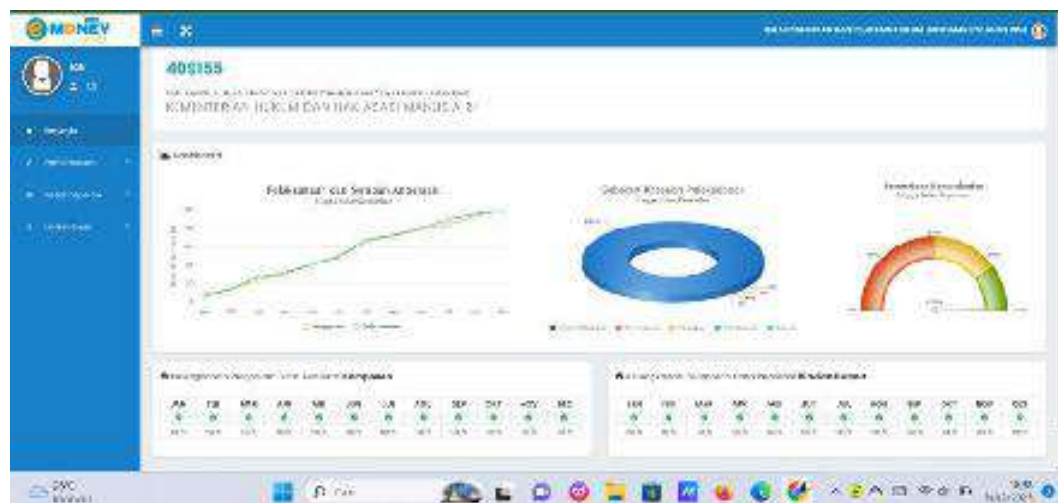




## D.2 E-Monev

Aplikasi E-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data Realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian Lembaga). Aplikasi E-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP dan dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>.

*Gambar 6. Screenshot Aplikasi E-Monev*



Pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan kinerja dan anggaran dapat dilihat pada aplikasi e-monev.bappenas. Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau tahun 2023 dinyatakan berhasil sebab realisasi capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan melampaui target dan dapat dilihat pada aplikasi e-monev.bappenas dengan alamat <https://e-monev.bappenas.go.id>.

## E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Selama Tahun 2023 Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau telah mendapatkan beberapa penghargaan dari beberapa pihak sebagai apresiasi atas pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan, berikut daftar penghargaan yang diterima selama Tahun 2023:

*Tabel 31. Daftar Penghargaan yang Diterima*

No	Nama Penghargaan	Instansi yang Memberi
1	Peringkat Pertama Satker dengan Nilai Ikpa Indikator Deviasi Halaman III DIPA Terbaik	KPPN Batam

No	Nama Penghargaan	Instansi yang Memberi
	Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Sedang (Pagu 6-16 M)	
2	Peringkat Kedua Satker dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Semester I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Sedang (6-16 M)	KPPN Batam
3	Terbaik Pertama Satker dengan Capaian Komitmen Penggunaan Cash Management System (CMS) Semester I Tahun Anggaran 2023	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
4	Predikat Terbaik Satker dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2023	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
5	Peringkat Ketiga Pengumpulan Videografis Terbanyak Periode Juli Tahun 2023	Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham
6	Terbaik Pertama Satker atas Capaian Penyerapan Anggaran Hingga Triwulan III Tahun 2023	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
7	Terbaik Pertama Satker atas Capaian Kinerja Pelaksana Anggaran Triwulan III Tahun 2023	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk realisasi Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Semester II Tahun 2023 yang terdiri dari sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan semuanya telah melebihi target yang ditetapkan seperti:
  - a. Indikator Kinerja Utama Persentase alumni diklat yang meningkatkan kinerjanya ditargetkan 95% realisasinya mencapai 100,57%;
  - b. Indikator Kinerja program Persentase SDM di bidang Hukum dan HAM Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi ditargetkan 93% realisasinya mencapai 192,22%;
  - c. Indikator Kinerja Program Persentase alumni pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya ditargetkan 93% realisasinya mencapai 102%;
  - d. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Penyelenggaraan pelatihan di Wilayah ditargetkan 92% realisasinya mencapai 100,01%.
2. Secara penyerapan anggaran sampai periode bulan Desember Tahun Anggaran 2023 sudah baik. Hal ini terlihat dari capaian penyerapan anggaran sebesar 99,51% atau sebesar Rp. 8.867.255.838,- dari total pagu Rp. 8.910.874.000,-;
3. Untuk Capaian Kinerja Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu Nilai IKPA (40%) dan Nilai Smart (60%), maka untuk tahun 2023 Capaian Kinerja Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar 99,94% (Nilai IKPA 100 dan Nilai Smart 99,90);
4. Capaian Kinerja Lainnya berdasarkan E-Perfomance dan E-Monev Bapenas Tahun 2023 sudah melebihi target dengan rincian E-Perfomance sampai periode Desember mencapai 109% dan E-Monev Bapenas sudah selesai 100%;
5. Selama Tahun 2023 Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau mendapatkan sebanyak 7 Prestasi dan Penghargaan dari

KPPN Batam, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau dan Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan platform pembelajaran daring untuk memberikan akses yang lebih mudah dan fleksibilitas kepada peserta pelatihan.
2. Menyediakan program mentorship dan coaching yang melibatkan ASN senior atau para pimpinan untuk membimbing ASN junior. Hal tersebut dapat membantu mentransfer pengetahuan dan pengalaman (tacit knowledge), sehingga mempercepat pengembangan kompetensi ASN.
3. Segera mengimplemntasikan Peta jalan Pendidikan dan pelatihan BPSDM Hukum dan HAM Tahun 2024-2029 yang telah disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM bersama seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan berbasis pembelajaran ditempat kerja dan komunitas untuk menjangkau peserta yang lebih banyak lagi, sehingga pemenuhan pengembangan kompetensi setiap pegawai minimal 20 JP per Tahun dapat terwujud.



## LAMPIRAN LAMPIRAN



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Asep Kurnia  
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Hukum dan HAM



Asep Kurnia  
NIP. 196611191988031001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM  
Kepulauan Riau



Rinto Gunawan Sitorus  
NIP. 198208292008011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**  
**DENGAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
		2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	95%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%
		3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	1. Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	92%

No.	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus Mengikuti Pelatihan di Wilayah	94%

No.	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2
		3. Nilai SMART	95
		4. Jumlah laporan capaian kinerja	2
3.	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%
		2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
	<b>Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah</b>	Rp. 8.910.874.000,-
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 3.355.356.000,-
2.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 4.711.016.000,-
3.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 844.502.000,-

Batam, 2 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Hukum dan HAM



Asep Kumia  
NIP. 196611191986031001

Pihak Pertama,  
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM  
Kepulauan Riau



Rinto Gunawan Sitorus  
NIP. 196208292008011001





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinto Gunawan Sitorus  
Jabatan : Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Batam, 2 Januari 2023

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM  
Kepulauan Riau

Rinto Gunawan Sitorus  
NIP. 198208292008011001











KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN RIAU

# PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : W.32-402.02.02/TAHUN 2023

Diberi Kepada :

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Yang Telah :

Meraih Predikat Terbaik Atas Capaian Pemyerapan Anggaran Hingga Trwulan III Tahun 2023  
Oktober 2022-2023

Ditandatangani, 29 Oktober 2023

Kepala Kantor Wilayah

**INYOMAN GEDE SURYA MATARAM**  
NIP.197102031991031001



KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KEPULAUAN RIAU

# PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : W.32-402.02.02/TAHUN 2023

Diberi Kepada :

**BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU**

Yang Telah :

Meraih Predikat Terbaik Atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Trwulan III Tahun 2023  
Oktober 2022-2023

Ditandatangani, 29 Oktober 2023

Kepala Kantor Wilayah

**INYOMAN GEDE SURYA MATARAM**  
NIP.197102031991031001

